



Bendung Argoguruh, Lampung



air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

4

PERSIAPKAN SDM TERLATIH
BIDANG RAWA DAN TAMBAK

10

GROUND BREAKING BENDUNG DAN
SALURAN SUPLESI WAY BESAI

12

GROUND BREAKING
PEMBANGUNAN WADUK DIPONEGORO



KELOLA RAWA UNTUK KETAHANAN PANGAN

ISSN 1693-8003



9 771693 800383

Pembina

Djoko Kirmanto
Mohamad Hasan • Mudjadi
Eko Subekti • Arie Setiadi
Moerwanto • Pitoyo Subandrio
• A. Hasanudin • Hartanto

Penanggung Jawab

Leonarda Ibnu Said

Pemimpin Umum

Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi

Trinanda SP Sitorus

Redaksi

Tine Rosdiana •
Kety Fillaily • Erytra Tiara •
Daswandi Budi Indra

Kontributor

Emir Faridz

Desain/Layout

M. Syauckani • Noor Choliss

TU/Sekretaris

Isbandiyah

Data

Nurullia Anjani •
Dewi Anggraeni • Marsono

Foto/Dokumentasi

M. Syauckani • M. Kurdi
• Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi

Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Gedung Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7396616 pes. 515
Fax. (021) 7210395
e-mail: humassda@yahoo.com
humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Pada edisi majalah air kali ini pengelolaan rawa hendaknya melihat fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialnya. Rawa bermanfaat untuk perlindungan iklim, tidak semua lahan rawa dapat dikembangkan, di mana pengelolaan rawa memperhatikan aspek konservasi, dengan tetap pengembangannya untuk mendukung produktivitas lahan rawa dalam meningkatkan produksi pangan.

Pengembangan lahan rawa, harus didukung perencanaan yang matang, seperti harmonisasi produk hukum perbaikan prosedur perizinan, penyempurnaan peta gambut eksisting, pemecahan permasalahan potensi konflik di daerah rawa, hingga perkuatan status hukum masyarakat adat setempat.

Selain itu juga diulas mengenai upaya ditjen sumber daya air dalam aksi peduli air. Dan beragam aktivitas dan kegiatan bidang sumber daya air yang kami rangkum dalam edisi kali ini. Kemudian dalam rangka kompensasi khusus kenaikan harga BBM, kami sajikan upaya Kementerian Pekerjaan Umum melalui penyediaan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin melalui program pembangunan infrastruktur pemukiman dan pemberdayaan masyarakat di 7.300 pedesaan, program penyediaan air minum bagi 318 desa nelayan, serta penyediaan air baku, pembangunan embung di 93 kabupaten/kota, serta perbaikan irigasi di 4.000 desa dalam wujud P4 ISDA (Program percepatan

dan perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air).



RALAT

Pada **Majalah Air Edisi Maret-April 2013**, Halaman 18 (Glossary) Pengertian Banjir adalah Peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat **seharusnya** Banjir Menurut PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, *Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.* Pengertian **Air Baku** adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum **seharusnya** Air Baku Menurut UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pengembangan sumber daya air yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan pemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai keperluan lainnya.



LAPORAN UTAMA
PERSIAPKAN SDM TERLATIH BIDANG RAWA DAN TAMBAK

Rawa bermanfaat nyata bagi kehidupan seperti manfaat ekologi untuk perlindungan iklim, namun di sisi lain, pengembangan rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan benar akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati dan perubahan iklim dunia.



LAPORAN KHUSUS
GROUND BREAKING BENDUNG DAN SALURAN SUPLESI WAY BESAI

Provinsi Lampung akan segera mempunyai bendung baru yaitu Bendung Way Besai. Bendung yang berlokasi di Desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kab. Way Kanan Lampung merupakan hasil kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Lampung.



LAPORAN KHUSUS
GROUND BREAKING PEMBANGUNAN WADUK DIPONEGORO

Kebutuhan air di Kota Semarang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Ground Breaking pembangunan Waduk Diponegoro.



LAPORAN KHUSUS
GROUND BREAKING PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI BENDUNGAN

Saat ini masyarakat sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya air sudah sangat kritis. dan salah satu penanganan yang terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun penampung-penampung air seperti waduk atau bendungan untuk menampung air, irigasi dan air baku serta tenaga listrik.



LAPORAN KHUSUS
KAMPANYE PEDULI AIR

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah dengan potensi cadangan sumber daya air sebesar +3.906 milyar m³/tahun yang tersebar di seluruh tanah air dari 8.007 daerah aliran sungai dan 521 danau dengan volume andalan yang dapat dimanfaatkan sekitar +690 milyar m³/tahun.



PROFIL INFRASTRUKTUR
BENDUNG PAMARAYAN

Bendung Pamarayan terletak di provinsi Banten, di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian. Secara historis, keberadaan bendung ini memiliki sejarah yang cukup tua, dimulai sejak tahun 1918, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjalanannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bendung Pamarayan pemeliharaannya menjadi terlantar, dalam arti kurang mendapat perhatian dari Pemerintah.

LAPORAN UTAMA

- 4 Persiapkan SDM Terlatih Bidang Rawa dan Tambak

LAPORAN KHUSUS

- 10 *Ground Breaking* Bendung dan Saluran Supleksi Way Besai
- 12 *Ground Breaking* Pembangunan Waduk Diponegoro
- 14 *Ground Breaking* Pembangunan Gedung Balai Bendungan
- 16 Kegiatan OP Butuh Peran Serta Masyarakat
- 19 Kampanye Peduli Air
- 24 Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air
- 28 Puncak Perayaan Hari Air Dunia XXI: Tingkatkan Kesadaran Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air
- 32 *Summary*: Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Air Dunia 2013 Kementerian Pekerjaan Umum
- 35 Deklarasi Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

PROFIL INFRASTRUKTUR

- 36 Bendung Pamarayan

FOKUS

- 38 Sosialisasi Pengolahan Data dan Publikasi Informasi Sumber Daya Air

BERANDA

- 41 Kompetensi SDM Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa
- 43 Pengalihan Subsidi BBM Untuk Bangun Infrastruktur

PERSIAPKAN SDM TERLATIH BIDANG RAWA DAN TAMBAK



Rawa bermanfaat nyata bagi kehidupan seperti manfaat ekologi untuk perlindungan iklim, namun di sisi lain, pengembangan rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan benar akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati dan perubahan iklim dunia.

“Pada UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan beberapa undang-undang lain yang melatarbelakangi RPP Rawa telah memberikan andil yang besar bagi perikehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Eko Subekti, Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, pada acara Peningkatan Kemampuan Bidang Perencanaan Teknis Rawa dan Tambak Wilayah Barat dan Timur Tahun Anggaran 2013, 19 Mei 2013, di Lampung.





Menyadari fungsi lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi rawa, pengelolaan rawa harus memperhatikan aspek konservasi, aspek pendayagunaan dan aspek pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan berbasis kesatuan hidrologis dan wilayah sungai.

Indonesia memiliki 33,4 juta ha lahan rawa yang terdiri dari 20,1 juta ha lahan rawa pasang surut dan 13,3 juta ha lahan rawa lebak. Dan sampai saat ini hanya 1,8 juta ha lahan rawa yang terbangun dan hanya seluas 954 ribu ha yang dimanfaatkan, untuk lahan sawah, perkebunan, tambak ikan dan tambak garam.

“Tidak semua rawa tersebut akan kita kembangkan karena sebagian akan kita alokasikan untuk konservasi sebagai rawa dengan fungsi lindung. Dan untuk kedepannya, pengembangan rawa ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan rawa dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Maka hal penting yang harus dilakukan sesegera mungkin yaitu menyediakan data rawa dan tambak yang tepat, akurat dan dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*,” jelas Eko Subekti.

PENGELOLAAN RAWA

Pengelolaan rawa merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air, maka harus didukung oleh sumber daya yang handal dan profesional dalam tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan operasi dan pemeliharannya.

Beberapa kendala yang sering muncul saat ini adalah timbulnya kesenjangan antara tenaga junior dan tenaga senior, yang antara lain disebabkan oleh banyaknya tenaga yang memasuki usia pensiun sementara *recruitment* pegawai baru sangat terbatas. Kemudian kegiatan perencanaan teknis lebih banyak dilakukan oleh konsultan, bahkan perencanaan yang sederhana seperti rehabilitasi saluran dan bangunan-bangunan air yang sederhana dilakukan dengan kontrak kepada pihak konsultan. “Untuk itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada para *engineer* muda khususnya yang berkecimpung di bidang perencanaan teknis rawa. Dan sudah sepatutnya SDM Ditjen SDA dibekali pengetahuan yang baik, khususnya bidang perencanaan, karena lemahnya perencanaan akan mengakibatkan inefisiensi dan

pemborosan bahkan berakibat pada pekerjaan yang tidak mencapai sasaran,” ungkap Direktur Irigasi dan Rawa.

Oleh karena itu sejak tahapan perencanaan pekerjaan, penguasaan teknis atas pekerjaan harus dimiliki oleh sumber daya manusia Ditjen SDA sehingga dapat memberikan hasil yang berkualitas sampai dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta terwujudnya efisiensi pada suatu kegiatan. (*anj/ech*)



PENGEMBANGAN RAWA DI INDONESIA



Pelaksanaan perkembangan rawa harus memperhatikan beberapa aspek seperti konservasi, aspek pendayagunaan dan aspek pengendalian daya rusak air secara menyeluruh dan berbasis kesatuan hidrologis dan wilayah sungai.

Perkembangan rawa dilakukan secara spontan yang mulai dilakukan pada tahun 1920 dengan luas rawa 2,4 juta hektar. "Di tahun 1970 mulai dilaksanakan kembali program-program yang terkait dengan reklamasi rawa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan program transmigrasi dan produksi tanaman pangan sekitar 1,3 juta hektar," ujar Eko Subekti.



Dalam melaksanakan perkembangan rawa diperlukan investasi dari beberapa pihak, seperti pihak swasta yang mulai berinvestasi di lahan rawa berupa kayu, kertas, kelapa sawit dan tambak udang yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1980. Di tahun 1997–2009 ada beberapa kegiatan yang merupakan titik balik dari perkembangan rawa di Indonesia diantaranya adalah *Mega Rice Project* Kalimantan Tengah.

Untuk melakukan perkembangan rawa yang ada di Indonesia, Eko Subekti mengatakan saat ini masih dilakukan pengumpulan dan pengembangan data rawa yang ada pada data *Water Management For Climate Change Mitigation and Adaptive Development in The Lowlands (WACLIMAD)*, dengan menunjukkan kekurangan atau pada area yang masih belum lengkap dan pada daerah yang masih terhambat dengan penerapan kebijakan yang berkelanjutan.

“Pengembangan rawa yang ada di Indonesia harus didukung dengan rencana-rencana untuk meningkatkan perkembangan rawa seperti harmonisasi aspek hukum mengenai rawa, perbaikan prosedur perizinan, penyempurnaan peta gambut eksisting, pemecahan masalah konflik pada daerah rawa dan meningkatkan transparansi serta

perkuatan status hukum masyarakat adat. Dan yang paling penting adalah harus selesainya peraturan perundang-undangan dibidang rawa. Sampai saat ini perkembangan RPP Rawa telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PU dan Menteri Kehutanan. Selain mendapat persetujuan, RPP Rawa juga masih menunggu persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Koordinator Perekonomian,” lanjut Eko Subekti.

Selain itu pengembangan rawa tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur saja, tapi juga kerjasama antara kementerian dan pemerintah

provinsi serta pemerintah kabupaten/kota terutama untuk mencegah konversi lahan atau perubahan tata guna lahan di berbagai daerah. **(nan/ kty)**



RAWA SRAGI

Potensi rawa yang ada di Provinsi Lampung secara keseluruhan seluas 127.993 hektar, termasuk di dalamnya rawa lebak dan rawa pasang surut. Untuk rawa lebak seluas 62.300 hektar dan yang telah dikembangkan seluas 25.578 hektar sedangkan untuk rawa pasang surut seluas 66.653 hektar dan yang sudah dikembangkan seluas 50.158 hektar. Maka total rawa yang sudah dikembangkan sebesar 75.706 hektar yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus.

Salah satu rawa yang dikembangkan untuk mendukung program ketahanan pangan adalah Rawa Sragi yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, yang mulai dirintis menjadi lahan pertanian sejak tahun 1979 dan selesai pada tahun 1991 (negara donor Belanda). Rawa Sragi merupakan masterpiece karena dengan luas 23.000 Ha dapat menghasilkan padi sebanyak 7 sampai 8 ton setiap tahunnya. Hal tersebut juga didukung dengan teknologi tabat dan saluran *ferrocement*.

“Luas areal pertanian 23.000 ha yang meliputi Rawa Pisang seluas 10.525 ha, Rawa Kramat seluas 7.288 ha, Rawa Karya Tani seluas 5.187 ha yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan,” jelas Trisasongko Widiyanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.



Trisasongko Widiyanto mengatakan adanya kekurangan suplai air yang hanya cukup untuk 12 musim tanam dalam satu tahun maka dibuatlah bendung yaitu Bendung Jabung yang dibangun pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 dengan konstruksi tipe bendung karet.

“Sejak selesai dibangun belum pernah berfungsi karena belum dibangun saluran pembawa ke areal Rawa Sragi. Dan ditambah lagi kondisi bendung karet sekarang tidak berfungsi karena terdapat banyak kebocoran sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi,” lanjut Trisasongko Widiyanto.

Untuk mensuplai air ke Rawa Sragi telah dilakukan perencanaan di tahun 2012, dimana airnya dialiri dari Bendung Jabung untuk dikembangkan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu Daerah





Irigasi (DI) yang meliputi Rawa Sragi II dan Rawa Sragi III dengan *service area* seluas 6.638 Ha yang terbagi dengan area persawahan seluas 5.638 hektar dan 1000 ha serta beralih dari sistem rawa ke sistem irigasi teknis.

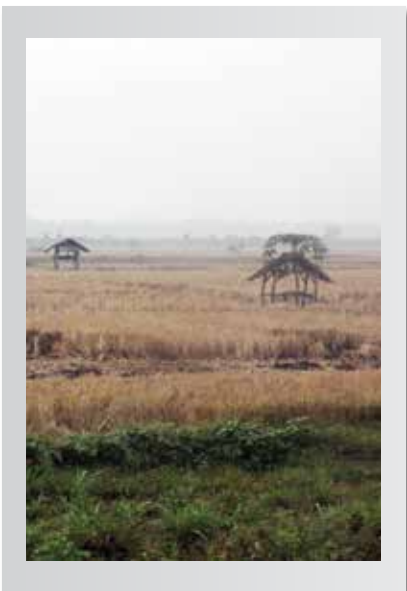
Rencana pengembangan Bendung Jabung menelan biaya sebesar Rp1.485.000.000.000,- untuk



sepuluh pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan pembangunan Bendung Jabung, Pekerjaan pembangunan *feader canal*, pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder Sragi II, pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder Sragi III, pekerjaan pembangunan saluran tersier Sragi II dan Sragi III, pekerjaan pembangunan Sukaraja Tiga Dam, pekerjaan

pembangunan Saluran Suplesi Kanan, pekerjaan pembangunan saluran primer dan sekunder Rawa Pisang serta *land acquisition cost*.

Trisasongko Widiyanto berharap ke depannya pembangunan Bendung Jabung ini akan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan air baku dan irigasi. **(anj/tin)**



GROUND BREAKING BENDUNG DAN SALURAN SUPLESI WAY BESAI



Provinsi Lampung akan segera mempunyai bendung baru yaitu Bendung Way Besai. Bendung yang berlokasi di Desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kab. Way Kanan Lampung merupakan hasil kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Pelaksanaan Pembangunan Bendung dan Suplesi Way Besai dilakukan untuk memenuhi target surplus 10 juta ton beras. Dan dalam hal pendanaan pembangunan fisiknya dilaksanakan oleh BBWS Mesuji Sekampung sedangkan pembebasan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan," ujar Eko Subekti dalam acara *Ground Breaking* Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi Way Besai, 21 Mei 2013, di Lampung.





pengelolaan jaringan irigasi Way Kanan diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Selain itu juga dapat meningkatkan *income* per kapita masyarakat Kabupaten Way Kanan. Maka lahan persawahan juga harus dapat dimanfaatkan secara optimal, jangan sampai ada alih fungsi lahan. Selain itu, kelembagaan harus diperkuat dan ditingkatkan misalnya dengan meningkatkan pelatihan SDM/tenaga operasi dan pemeliharaan. **(anj)**

Bendung Way Besai dengan type Bendung Tetap, mempunyai lebar bendung 35 m, elevasi mercu bendung +254 m, elevasi lantai hulu +249 m, debit banjir rencana 12,45 m³/det, debit rencana saluran 6,03 m³/det dan *catchment area* Bendung Way Besai 210 km². Pembangunan Bendung dan Saluran Suplesi Way Besai sepanjang 6,6 Km diharapkan nantinya dapat

mengairi sawah seluas 3.500 Ha. Pembangunan fisik bendung ini bersumber dari dana APBN 2013 dengan nilai kontrak Rp 22 milyar dengan kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya dan konsultan pengawas PT. Aditya Engineering Consultant.

Bupati Way Kanan, Bustami Zainudin, mengatakan pengembangan dan



GROUND BREAKING PEMBANGUNAN WADUK DIPONEGORO



Kebutuhan air di Kota Semarang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan *Ground Breaking* pembangunan Waduk Diponegoro.

“Dari keterbatasan sumber air tersebut perlu dibangun waduk atau bendungan untuk menampung air selama musim hujan agar air yang ada di sungai tidak terbuang begitu saja dan air tanah di sekitarnya dapat terjaga sehingga masyarakat sekitarnya dapat terjaga sehingga masyarakat sekitar akan merasakan manfaatnya akan ketersediaan air pada musim kemarau,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam acara *Ground Breaking* Pembangunan Waduk Diponegoro, 4 Juni 2013, di Semarang, Jawa Tengah.



Luas Daerah Tangkapan air dari Waduk Diponegoro adalah 10,24 Km² dengan panjang sungai 7,52 Km, dan tipe Bendungan adalah urugan (batu dan *random*) berinti lempung keadap. Biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Waduk Diponegoro ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai kontrak sebesar Rp 21 milyar, pelaksana pembangunan Waduk Diponegoro adalah PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Wilayah V dan pelaksanaan waktu pekerjaan adalah 300 hari kalender.

Hermanto Dardak menambahkan dengan adanya Waduk Diponegoro diharapkan kebutuhan air baku dan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat setempat dan juga mahasiswa Universitas Diponegoro dapat terpenuhi dengan baik.

Turut hadir dalam acara *Ground Breaking*, Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio, Rektor Universitas Diponegoro Sudharto P. Hadi, Plh. Kepala BBWS Pemali Juana, Indra Bangun serta para Pejabat di lingkungan BBWS Pemali Juana. **(ard)**

Waduk yang berlokasi di Desa Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan airnya bersumber dari Kali Krengseng/ Seketak, mempunyai manfaat untuk penyediaan air baku laboratorium seperti laboratorium hidrolika, perikanan, teknik lingkungan, hidrografi; penyediaan air baku Rumah

Sakit Diponegoro; laboratorium lapangan seperti pengolahan air baku, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan operasi waduk; bendungan yang berfungsi sebagai pendidikan dan penelitian bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro, rekreasi dan pemancingan dan konservasi lingkungan.



GROUND BREAKING PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI BENDUNGAN



“Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang paling penting dan paling besar tampungannya tidak hanya karena tingkat kekritisannya yang semakin terasa di berbagai daerah tapi juga karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, namun untuk pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT sudah kritis, diperparah lagi dengan kondisi iklim yang fluktuatif antara debit hujan yang besar dan air yang semakin hari semakin menurun, maka peranan infrastruktur sumber daya air semakin penting dan proses pembangunan bendungan yang diawali dengan sertifikasi hingga pengelolaannya dilengkapi dengan keberadaan komisi keamanan bendungan,” jelas Moh. Hasan, Direktur Jenderal SDA, ketika membuka acara *Ground Breaking* Pembangunan Gedung Balai Bendungan, 31 Mei 2013, di Jakarta.

Saat ini masyarakat sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya air sudah sangat kritis. Dan salah satu penanganan yang terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun penampung-penampung air seperti waduk atau bendungan, yang mempunyai berbagai macam manfaat diantaranya menampung air, irigasi dan air baku serta tenaga listrik. Namun selain manfaat yang besar, juga menyimpan potensi bahaya yang besar pula yang dapat mengancam kehidupan manusia.

Direktur Jenderal SDA, Moh. Hasan didampingi oleh Sekretaris Jenderal SDA, Mudjadi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Yadi Siswadi, Kepala Balai Bendungan, Tri Bayu Adji, serta Kasubag. TU Balai Bendungan Mawardi, dan dihadiri oleh karyawan/karyawati Balai Bendungan.

“Dengan adanya gedung yang baru diharapkan Balai Bendungan menjadi pusat pengetahuan bendungan atau *center of excellent of dams* yang ada di Indonesia, mengingat ke depannya akan dibangun 13 buah bendungan di antaranya di BBWS Bengawan Solo akan ada 4 bendungan baru namun terbentur dengan permasalahan jumlah sumber daya manusianya.

Untuk itu diharapkan sumber daya manusia yang ada di Balai Bendungan dapat berperan lebih baik lagi dan membentuk kaderisasi khusus di bidang bendungan. Fasilitas yang nantinya akan disediakan di gedung baru harus dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga dapat bekerja secara profesional," lanjut Moh. Hasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Bendungan Direktorat Jenderal SDA, Tri Bayu Adji, mengatakan bahwa pembangunan gedung Balai Bendungan menelan biaya sebesar Rp.13 milyar yang berasal dari



program *Dam Operational Project* dari Bank Dunia dan rencananya akan didirikan dengan luas 2.400 m², terdiri dari 4 lantai di mana 3 lantai ke bawah akan dipergunakan untuk Balai Bendungan dan lantai 4 akan dipergunakan Pusdiklat Kementerian PU untuk *assessment center* pegawai Kementerian PU. Gedung Balai Bendungan rencananya terdiri dari ruang perpustakaan, ruang kerja staf, ruang komisi keamanan bendungan dan ruang arsip Bendungan Nasional. Sedangkan untuk *semi basement* akan dipergunakan untuk ruang parkir.

"Selain melakukan pengawasan terhadap setiap bendungan yang ada di Indonesia, Balai Bendungan juga harus melakukan evaluasi dan melakukan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM sehingga nantinya dengan kapasitas kerja yang memadai, sumber daya manusianya juga akan lebih berkualitas dalam bidang bendungan," ungkap Tri Bayu Adji, Kepala Balai Bendungan.

Pembangunan gedung ini dikerjakan oleh PT. Adicpta Karya Hernanda dengan konsultan supervisi yaitu PT. Prima Asri Aditama Mandiri. Dan dikerjakan selama 5 bulan sehingga Oktober bisa selesai dan November dapat segera digunakan. **(tin/nan)**



MASALAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Balai Bendungan melakukan pengawasan dan memberikan *advice* kepada semua pembangun yang akan membangun bendungan terutama bendungan yang berubah fungsinya bukan hanya sekedar menampung air tetapi juga untuk irigasi karena berhubungan dengan keamanan bendungan, maka semua bendungan khususnya bendungan besar dengan ciri-ciri ketinggian lebih dari 15 m ataupun di bawah 15 meter dan tampungan di atas 5.000 m³, yang berjumlah 280 buah di Indonesia, harus siap dievaluasi.

"Sebenarnya permasalahan klise dalam membangun bendungan adalah masalah pengelolaan dan dana. Selama ini pengelolaan bendungan kurang diperhatikan dengan kata lain kita pintar membangun tapi

tidak pintar merawat, sehingga tampungannya menjadi tidak maksimal dan mengurangi umur bendungan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah dana pemeliharaan, tidak terawatnya bendungan juga disebabkan oleh kurangnya dana pemeliharaan bendungan. Tapi saat ini dana pemeliharaan bendungan sudah disiapkan oleh pengelolanya," kata Tri Bayu Adji.

Lanjut Kepala Balai Bendungan semua daerah bisa dibangun bendungan hanya saja dalam membangun bendungan bukan hanya persyaratan teknis tapi juga persyaratan sertifikasi bendungan seperti mempunyai SIPA (surat ijin penggunaan air), surat ijin prinsip pembangunan, masuk dalam RTRW dan mengajukan LARAP (*land aquisition resettlement action plan*)

Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Permukiman.

Kemudian dari segi pendanaan juga harus dipergunakan secara efektif dan efisien karena pembangunan bendungan dengan biaya yang besar belum tentu menghasilkan tampungan yang besar karena justru biaya yang lebih besar hanya untuk pembebasan lahan. Untuk itu Tri Bayu Adji mengharap agar dalam membangun bendungan biayanya harus dipergunakan seefektif mungkin dan memberikan tampungan air yang besar pula serta dana pemeliharaan bagi bendungan agar disiapkan sehingga bendungan dapat memberikan manfaat yang banyak dan lama bagi kebutuhan sumber daya air masyarakat. **(dan/ech)**

KEGIATAN OP BUTUH PERAN SERTA MASYARAKAT



Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air.

Untuk itu Direktorat Bina OP Ditjen SDA Kementerian PU menyelenggarakan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Wilayah II Tahun 2013, 1 Mei 2013, di Banten.

“Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya, maka pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan yaitu wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat; wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” jelas Hartanto, Direktur Bina OP.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membuat pola dan rencana pengelolaan sumber daya air berbasis Wilayah Sungai (WS) yang kegiatannya meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Sumber Daya Air.

“Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang yang sudah ditetapkan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,” lanjut Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Tidak hanya pemerintah yang melakukan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air melainkan masyarakat dan petani serta P3A/GP3A/IP3A juga harus ikut serta. Hal itu terkait dengan Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2007—Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).



“Peran P3A/GP3A/IP3A untuk Operasi adalah dengan memberikan usulan rencana tata lahan dan pengajuan akan kebutuhan air. Sedangkan untuk Pemeliharaannya adalah dengan melakukan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, pemeliharaan jaringan irigasi, pengamanan jaringan dan pelaporan kerusakan jaringan,” ungkap Hartanto.

Guna mendukung ketersediaan air untuk jaringan irigasi yang ada di Indonesia, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya



Air Kementerian Pekerjaan Umum, membangun infrastruktur sumber daya air seperti bendung, bendungan dan embung.



PERMASALAHAN SUMBER DAYA AIR BANTEN

Provinsi Banten yang terdiri dari 8 kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya air yang cukup banyak, namun belum semuanya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal selain karena kondisi geografis yang sulit, juga karena masih kurang tersedianya prasarana sumber daya air.

Beberapa program prioritas bidang sumber daya air di Provinsi Banten di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi teknis seluas 20.474 ha pada daerah irigasi kewenangan provinsi, rehabilitasi irigasi terutama di 13 daerah irigasi kewenangan provinsi, optimalisasi operasi dan pemeliharaan seluruh jaringan irigasi terbangun, melindungi kawasan permukiman dan pusat-pusat produksi dari dampak bahaya banjir dan melakukan pengerukan sedimentasi di sungai dan bendung serta pengamanan pantai.

“Namun Provinsi Banten hanya mempunyai 2 bendung yang besar seperti Bendung Pasar Baru Pintu 10 daerah Irigasi (DI) Cisadane dan Bendung Pamarayan Daerah Irigasi (DI) Ciujung, dan belum mempunyai bendungan yang kapasitasnya memadai, untuk itu upaya membangun Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula oleh Pemerintah harus segera terwujud mengingat permasalahan sumber daya air sudah sangat kompleks,” jelas Ratu Atut, Gubernur Provinsi Banten.



Permasalahan yang terkait pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di Banten, di antaranya yaitu kerusakan sumber daya air akibat terjadinya pembukaan lahan hutan secara besar-besaran, keterbatasan biaya operasi dan pemeliharaan dengan AKNOP atau angka kebutuhan nyata pemeliharaan irigasi sehingga fungsi layanannya belum optimal, dan kurangnya peran serta masyarakat yang dikarenakan kurangnya SDM yang terampil untuk menangani operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.

Atas diharapkan agar melalui kegiatan ini beberapa permasalahan tersebut dapat terselesaikan dan pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten dapat cepat terlaksana sehingga dapat membantu kehidupan masyarakat di Provinsi Banten. **(idr/dan)**



PEMBAGIAN WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SDA (IRIGASI) (UU No. 7/2004 dan PP No. 20/2006)		
PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pengelolaan SDA yang terletak pada Wilayah Sungai: <ul style="list-style-type: none"> • Lintas Provinsi • Lintas Negara • Strategis Nasional Pasal 14, UU No. 7/2004	Pengelolaan SDA yang terletak pada Wilayah Sungai: <ul style="list-style-type: none"> • Lintas Kabupaten/Kota Pasal 15, UU No. 7/2004	Pengelolaan SDA yang terletak pada Wilayah Sungai: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kabupaten/Kota Pasal 16, UU No. 7/2004
Pengembangan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Lintas Provinsi • Lintas Negara • Strategis Nasional Pasal 16, PP 20/2006	Pengembangan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Lintas Kabupaten/Kota Pasal 17, PP 20/2006	Pengembangan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kabupaten/Kota Pasal 18, PP 20/2006
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Luas > 3.000 ha • Lintas Provinsi • Lintas Negara • Strategis Nasional Pasal 16, PP 20/2006	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Luas 1.000 – 3.000 ha • Lintas Kabupaten/Kota Pasal 17, PP 20/2006	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer & Sekunder pada DI: <ul style="list-style-type: none"> • Luas < 1.000 ha • Dalam Kabupaten/Kota Pasal 18, PP 20/2006

KAMPANYE PEDULI AIR



Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah dengan potensi cadangan sumber daya air sebesar +3.906 milyar m³/tahun yang tersebar di seluruh tanah air dari 8.007 daerah aliran sungai dan 521 danau dengan volume andalan yang dapat dimanfaatkan sekitar +690 milyar m³/tahun.

“Dengan potensi sumber daya air yang melimpah kita juga dihadapkan pada tantangan masa depan yang memerlukan perhatian khusus seperti pertumbuhan jumlah penduduk, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta perubahan iklim akan menjadi isu-isu strategis yang akan berdampak kepada keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya air,” jelas Moh. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Aksi Peduli Air dengan tema Membangun Generasi Peduli Air, 1 Juni 2013, di Taman Cattleya, Jakarta Barat.



Kegiatan Aksi Peduli air ini merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu, seperti adanya hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah, *stakeholders* terkait civitas akademika dan masyarakat umum dalam rangka pengelolaan sumber air terpadu.

Adanya keterbukaan atau transparansi informasi yang sesuai dengan Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan berperan serta terhadap berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah.

Semua infrastruktur yang dibangun pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang untuk selanjutnya dibutuhkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebutuhan dan kondisi sebenarnya yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena semua program, kegiatan dan kebijakan pemerintah yang didasari oleh kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya air yaitu ketahanan air, energi dan pangan. Untuk itu potensi sumber daya air yang besar perlu dikelola lebih lanjut untuk memenuhi penyediaan air bagi berbagai keperluan air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi termasuk pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan keperluan pembangkit tenaga listrik. Dan saat ini Indonesia mempunyai potensi kotor energi sebesar 75 GigaWatt dan yang layak dikembangkan secara teknik dengan teknologi hanya 22.100 MegaWatt (*sumber: PLN, Draft RUKN 2010–2019*).

Komunitas-komunitas yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah Forum Remaja Penanggulangan Bencana Alam-Jakarta Selatan, dengan aktivitas membersihkan sungai dan penanggulangan bencana, Jakarta Green Monster-Jakarta Utara, dengan kegiatan penelitian limbah air sungai, Komunitas Cinta Ciliwung-Jakarta timur, dengan kegiatan penanaman pohon, edukasi dan wisata lingkungan sungai dan Komunitas Mat Peci-Ciliwung, dengan kegiatan





keterampilan kelompok tani, kompos padat dan cair, kerajinan dari barang bekas, pembuatan area edukasi, penelitian dan konservasi alam serta pembuatan area edukasi sampah lokal, komposting dan daur ulang.

Sementara perwakilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti lomba *science fair* adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah SMPN 3 Jakarta Selatan, SMPN 2 Jakarta Pusat, SMPN Jakarta Timur, SMP Ibu Pertiwi Jakarta Barat dan SMP Barunawati I Jakarta Barat.

TANTANGAN SUMBER DAYA AIR

“Curah hujan di Indonesia berkisar antara 1400–1600 mm/thn, dan banyak sekali permasalahan mengenai sumber daya air, ketika musim hujan kita banjir dan musim kemarau kita kekeringan. Dan karena kekeringan maka terdapat penurunan kualitas dan kuantitas air, dan tidak hanya itu saja tantangan masa depan seperti pertumbuhan jumlah penduduk, penurunan kualitas hidup dan perubahan iklim akan menjadi isu-isu strategis yang akan berdampak kepada keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya air. Semua ini memerlukan perhatian kita,” jelas Moh. Hasan.

Water is life, tidak ada kehidupan tanpa air dan *water is everybody business*, air tidak hanya untuk satu pihak, untuk itu pemerintah pusat harus bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dan yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga dapat memahami dan menyadari pentingnya air bagi kehidupan kita sehingga akan timbul empati dan kesadaran dari masyarakat untuk terus berupaya menjaga ketersediaan air dan lingkungan.

Lanjut Moh. Hasan, dibutuhkan usaha bersama yang tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat ditambah lagi dengan komunitas yang berkecimpung dalam bidang sumber daya air. Walaupun sekarang sudah banyak pihak yang sadar akan pentingnya sumber daya air, contohnya saja di perkotaan, gedung-gedung di Jakarta sudah menerapkan *green building* dengan konsep *zero runoff* contohnya menara BCA dan plaza Indonesia, di mana hujan yang turun di lingkungannya tidak boleh ada yang keluar dan harus masuk terserap lingkungannya sehingga masuk ke dalam *landscapenya* atau ke dalam kolam yang dibuat di lingkungannya.

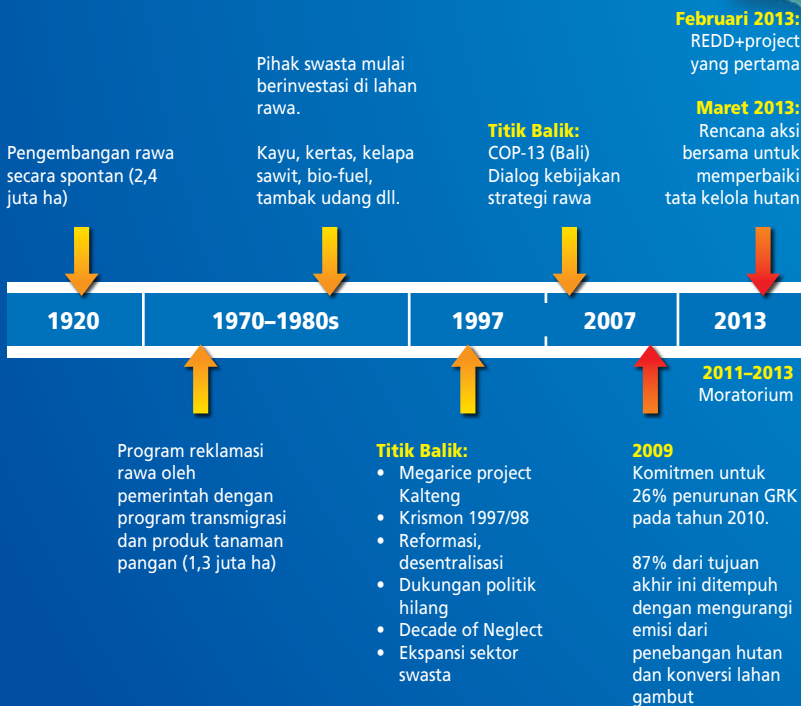
Moh. Hasan berharap agar kecintaan dan kepedulian kita atas lingkungan dan sumber daya air akan semakin meningkat, khususnya para komunitas yang telah melakukan gerakan besar yang dimulai dengan langkah kecil, semoga tetap berkreasi dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menyelamatkan ketersediaan air kita secara bersama-sama. **(ech/kty)**



SEBARAN RAWA PASA



SEJARAH PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN RAWA

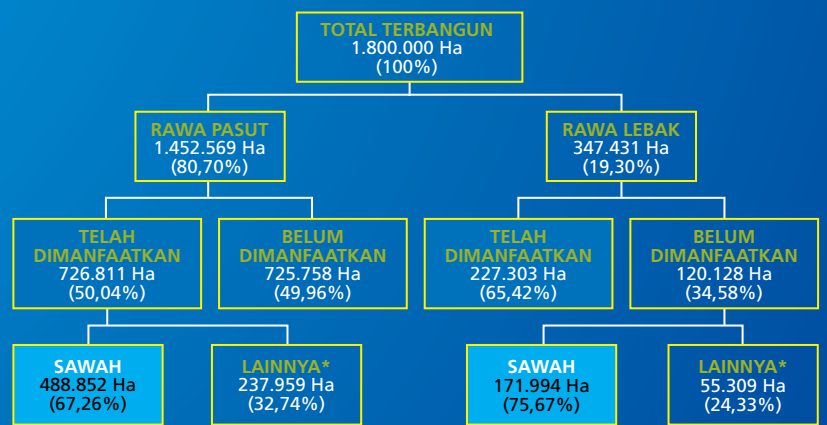


DAERAH ANG SURUT

LUAS DAERAH RAWA DI INDONESIA



DAERAH RAWA TERBANGUN



* Penggunaan lainnya untuk ladang, kebun dan tambak

KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



Pengelolaan sumber daya air tidak dibatasi oleh batas administratif suatu wilayah, namun oleh batas ekologis, hidrologis dan hidrogeologis. Kita mengenal “wilayah sungai” (WS) sebagai basis pengelolaan air permukaan dan “cekungan air tanah” (CAT) sebagai basis pengelolaan air tanah. Oleh karena itu mutlak diperlukan kesepahaman serta kerjasama antara pemilik kepentingan dalam wilayah sungai tersebut.

“Meskipun Hari Air Dunia selalu dirayakan setiap tanggal 22 Maret, namun kesadaran dan kepedulian terhadap sumber daya air harus selalu ada dalam diri kita, bukan hanya setiap warga Indonesia bahkan warga dunia sepanjang tahun. Dengan tema nasional HAD ke-21 tahun 2013, **“Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air”**, menyampaikan pesan bahwa tantangan bidang sumber daya air tidak bisa ditangani secara sporadis, sendiri-sendiri maupun hanya ditangani oleh pemerintah tapi harus dilakukan bersama-sama dan diharapkan dapat menggugah kepedulian semua pihak agar bekerja sama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu,” jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara *Indonesia Water Forum 2013* dan Seminar Nasional “Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan”, 7 Mei 2013, di Jakarta.

Turut dihadiri oleh para pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian PU, Kepala BBWS dan BWS Direktorat Jenderal SDA, pemerhati bidang sumber daya air, akademisi dan organisasi bidang sumber daya air.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat.



Pembiayaan pengelolaan wilayah sungai membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka kita harus mendorong kerjasama antara pemerintah, BUMN dan BUMD, swasta dan masyarakat umum, terutama dalam pembiayaan pengelolaan sumber daya air sesuai amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Lebih lanjut Djoko Kirmanto mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan sumber daya air tidak hanya terbatas yang meliputi wilayah Indonesia saja, kita juga memiliki 5 wilayah sungai lintas negara, dimana 1 WS berbatasan dengan negara Malaysia, 2 WS berbatasan dengan Timor Leste dan 2 WS berbatasan dengan negara Papua Nugini. Pameran dan seminar nasional ini sebenarnya merupakan sarana





"temu-stakeholders" untuk mengkomunikasikan secara visual dan klasikal mengenai hal-hal yang telah dan akan dilakukan terkait

pengelolaan sumber daya air. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik diharapkan dapat dibangun koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholders*

dalam upaya bersama mengatasi permasalahan sumber daya air yang multidimensional. **(tin/anj)**



STRATEGI KEMITRAAN SDA

Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya air terbesar ketiga yaitu sebesar 3,9 milyar m³, namun keberlimpahan tersebut mengandung beberapa masalah. Ketersediaan air di beberapa provinsi tidaklah sama contohnya saja di pulau Jawa dengan ketersediaan air sekitar 164 juta m³/tahun dan 4,2% air di Jawa untuk 57,5% penduduk Indonesia, sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara ketersediaan airnya sekitar 49 juta di mana 1,3% air di Bali dan Nusa Tenggara untuk 5,5% penduduk Indonesia.

“Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah tetapi distribusinya tidak merata. Hal tersebut ditambah lagi dengan peningkatan dinamika kependudukan dan pembangunan serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, sehingga bukan hanya

kualitas saja tetapi juga kuantitas sumber daya air menjadi terbatas,” jelas Direktur Jenderal SDA, Moh. Hasan.

Untuk strategi kemitraan pengelolaan SDA, Ditjen SDA kementerian PU melakukan *Public Private Partnership* (PPP) dalam pengembangan infrastruktur SDA (waduk, situ dan air baku), kelembagaan pengelolaan SDA seperti perluasan korporatisasi “RBO” (PJT) dan kerjasama pusat, provinsi dan kab/kota, modernisasi irigasi (efisiensi dalam *main system*), harmonisasi pola PSDA WS dengan RTRW dan pemberdayaan peran masyarakat yaitu komunitas peduli sungai dan P3A. Lanjut Moh. Hasan, dengan adanya strategi yang sudah dibuat akan menambah ragam kegiatan untuk menyelamatkan sumber daya air di Indonesia dan semakin menumbuhkan kesadaran semua pihak akan pentingnya air untuk kehidupan. **(tin/idr)**



PUNCAK PERAYAAN HARI AIR DUNIA XXI

TINGKATKAN KESADARAN KERJASAMA PENGELOLAAN SDA



Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang dibutuhkan semua orang, maka *water is everybody's business*. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi dan kepedulian yang efektif dengan semua pihak dalam pengelolaan sumber air yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam era demokrasi, segala kebijakan harus lahir dari kesepakatan masyarakat yang dielaborasi oleh lembaga pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang visioner, inspiratif, *acceptable* dan mampu menjawab persoalan di lapangan.

“Peringatan Hari Air Dunia 2013 dengan tema ‘Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air’ bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kerjasama dalam hal permintaan akses air, alokasi dan jasa yang terkait dengan air. Maka pengelolaan sumber daya air cara lama yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidak dapat lagi dilakukan karena kurang efektif untuk memecahkan masalah.

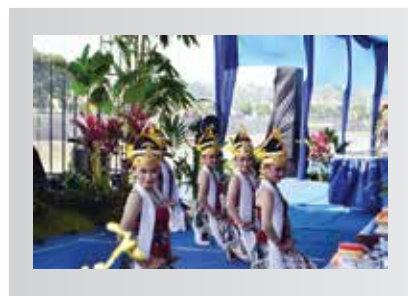
Saat ini pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan harus dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan para pemangku kepentingan untuk berperan aktif bersama dalam mengatasi permasalahan sumber daya air,” jelas Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum pada Puncak Perayaan Hari Air Dunia XXI, 6 Maret 2013, di pinggiran Kanal Banjir Barat, Semarang.

Turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo; Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budi Yuwono; Direktur Jenderal SDA, Mohamad Hasan; Sekretaris Jenderal SDA, Mudjadi; Rektor Universitas Diponegoro, Soedharto; Jajaran Pejabat Eselon II dan III dari Kementerian PU; Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan perwakilan dari berbagai Komunitas Peduli Sungai dan LSM di Indonesia.

Permasalahan sumber daya air tidak cukup diatasi dengan pendekatan teknik struktural saja tapi juga diperlukan pendekatan nonstruktural berupa pengaturan dan public governess campaign kepada masyarakat. Dalam hal pengaturan Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005 tentang Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 20/2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43/2008 tentang Air Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37/2010 tentang Bendungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38/2011 tentang Sungai. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam implementasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Untuk mengimplementasi pengelolaan sumber daya air, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12/2012 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang membagi wilayah Indonesia ke dalam 131 wilayah sungai. Dalam mencapai pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien telah dilakukan penataan dan perkuatan kelembagaan di pusat, daerah dan tingkat wilayah sungai menuju terciptanya pemisahan fungsi pengaturan, pelaksanaan dan pengoperasian pemeliharaan.

Agar keterpaduan tindakan dapat dicapai dalam implementasi pengelolaan sumber daya air tersebut, maka dibangunlah mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor dan pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Tercatat sejak 2008 telah dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, 26 Dewan Sumber Daya Air Provinsi, dan 1 Dewan Sumber Daya Air Kabupaten. Selain itu sejak tahun 2009 telah terbentuk 36 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai yang terdiri dari 33 TKPSDA Pusat dan 3 TKPSDA Wilayah Provinsi.





Djoko Kirmanto mengatakan agar seluruh komponen masyarakat memanfaatkan momentum perayaan Hari Air Dunia ini sebaik mungkin, dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap permasalahan sumber daya air. "Mari kita peduli kepada air. Tidak ada kehidupan tanpa air. Air adalah sumber kehidupan kita, sumber kehidupan anak cucu kita ke depan. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komunitas Peduli Sungai yang telah memberikan kepedulian dalam menyukseskan program pengelolaan sungai yang baik," lanjutnya.

Sejalan dengan tema Hari Air Dunia 2013 yaitu "Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air", dalam acara puncak perayaan Hari Air Dunia juga hadir Komunitas Peduli Sungai terbaik dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) terbaik

yang diberikan penghargaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri menerima penghargaan sebagai pemenang pertama kategori provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima penghargaan sebagai pemenang pertama kategori kabupaten dalam ajang penilaian kinerja pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum.

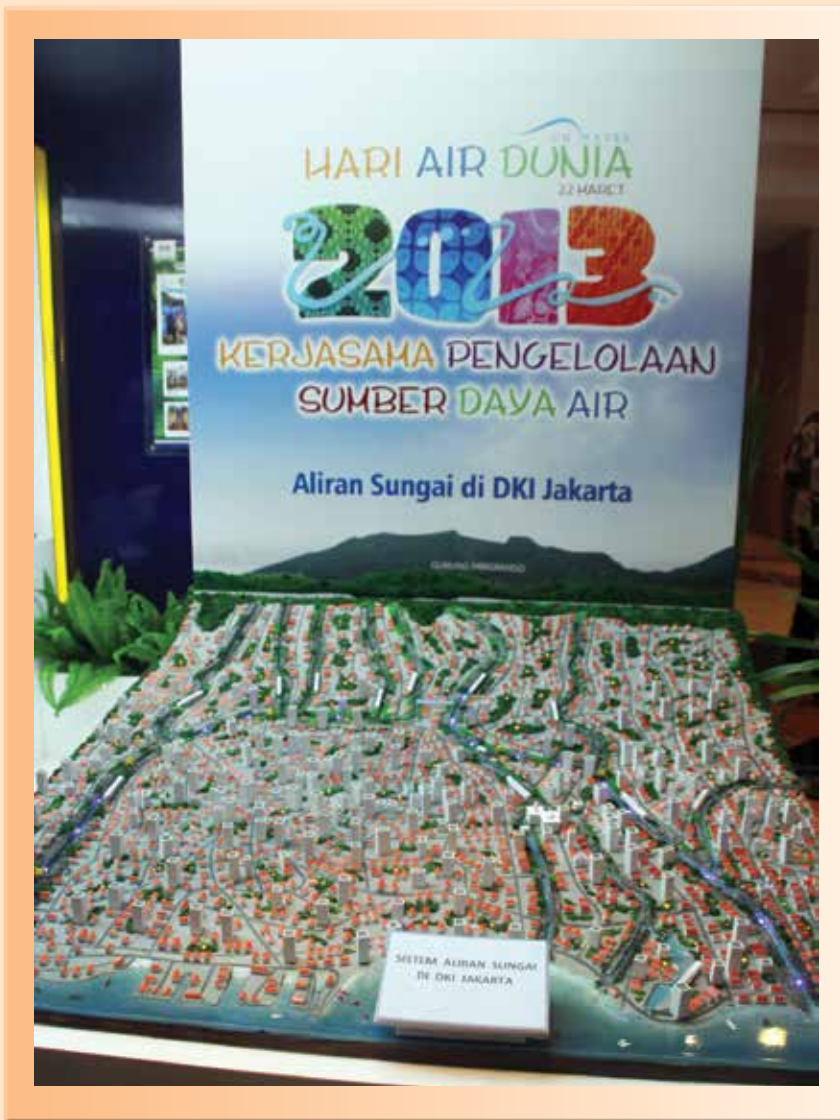
Menteri pekerjaan Umum juga melakukan pelepasan merpati dan penekanan sirine sebagai tanda resmi dibukanya perayaan Hari Air Dunia Tahun 2013. Djoko juga menandatangani prasasti peresmian proyek-proyek sumber daya air, di antaranya prasasti rehabilitasi Bendung Simongan di Semarang senilai Rp 60 miliar; pembangunan Bendung Cijalu di Kabupaten Cilacap senilai Rp 16 miliar; rehabilitasi Bendung Cileumeuh di Kabupaten Cilacap senilai 19

miliar; pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga senilai Rp 49 miliar, dan pengembangan Daerah Irigasi Lanang/Sidorejo Kiri di Kabupaten Grobogan senilai Rp 76 miliar. Menutup acara, Djoko Kirmanto melakukan penanaman bibit pohon flamboyan secara simbolis di pinggir Kanal Banjir Barat.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama juga berlangsung pembacaan Deklarasi Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah oleh Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budi Yuwono, ME. Acara Peringatan Hari Air Dunia juga diisi dengan peninjauan Kanal Banjir Barat yang menampilkan alat-alat operasi dan pemeliharaan sungai, atraksi paramotor, dan pawai perahu hias di Kanal Banjir Barat Semarang. **(Idr/nan)**



RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI AIR DUNIA 2013 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



Peringatan Hari Air Dunia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/KPTS/2011 untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi penyelenggaraan Hari Air Dunia yang setiap tahun diperingati. Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia pada dasarnya adalah kampanye peduli air dalam berbagai bentuk. Peringatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepedulian terhadap sumber daya air yang makin hari makin terbatas.

Dalam agenda Panitia Nasional Hari Air Dunia 2013, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Air Dunia adalah sebagai berikut:

KEGIATAN KAMPANYE PEDULI AIR



- *Walking for Water*
- Wawancara Apa Kabar Indoensia pagi TV One
- Aksi Damai Pawai Simpatik di Bundaran Hotel Indonesia
- Dialog Interaktif Gerakan Ciliwung Bersih
- Festival Lomba Mewarnai dan *Mini Games* Tingkat TK se-Jabodetabek
- Festival Lomba Menggambar dan Menyanyi Tingkat SD se-Jabodetabek
- Festival Lomba *Essay* dan paduan Suara Tingkat SMP se-Jabodetabek
- Festival Lomba Penelitian dan *Jingle* Tingkat SMA se-Jabodetabek
- Lomba Iklan Kreatif Tingkat Perguruan Tinggi
- Lomba Fotografi Tingkat Perguruan Tinggi
- Lomba Foto
- Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah
- Lomba Menggambar Tingkat SD
- Kolokium Puslitbang Sumber Daya Air 2013 dengan tema "Membangun Budaya Peduli Air"

KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT



- Gerakan Penanaman Mangrove dan Irigasi Tambak Partisipatif di Indramayu
- Gerakan Pembersihan Saluran Irigasi di Demak, Jawa Tengah
- Pembersihan Situ Citayam dan Situ Ul
- Pembersihan Saluran Irigasi Patok Besi di Bendung Barubug, Subang
- Demonstrasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Rusunawa di Pondok Kopi, Jakarta Timur
- Donor Darah (Kerjasama dengan PMI) di Kementerian PU
- Reboisasi "1 Tangan 1 Pohon" Selamatkan 1.000 Kehidupan di Malang
- Orasi Budaya di Universitas Brawijaya, Malang
- Kreativitas Anak Cinta Lingkungan di Universitas Brawijaya, Malang
- Pemberdayaan Ibu-ibu PKK dari RW di Kecamatan Kebayoran Lama
- Konservasi Mangrove oleh Siswa SMP di Muara Indah Kapuk, Cengkareng

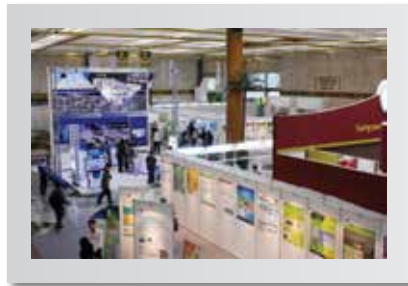


SEMINAR DAN LOKAKARYA

- Seminar, Lokakarya dan Lomba Karya Ilmiah di Jakarta Convention Center, 7–8 Mei 2013
- Semiloka Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
- Seminar “Perubahan Iklim, Konservasi Lahan, Ancaman Banjir dan Rob di DKI Jakarta” di Gedung Aula Barat ITB

PAMERAN

- Pameran Indonesia Water Forum 2013 di Jakarta Convention Center, 7–9 Mei 2013



PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Kampanye Publik untuk Sungai Cikapundung di SMAN 1 Bandung
- Advertorial di media massa
- Publikasi di *Metro TV*
- Pemasangan spanduk dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di empat titik gerbang tol

Puncak Peringatan Hari Air Dunia tingkat nasional tahun 2013 di Semarang, yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi tuan rumah penyelenggara, tepatnya di Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang merupakan

salah satu contoh nyata keberhasilan upaya pengelolaan sungai di wilayah perkotaan. Di lokasi ini dicanangkan pula gerakan restorasi dan pengelolaan sungai dengan pendekatan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat,

akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha. Momentum ini ditandai dengan pembacaan deklarasi kerjasama pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. **(tim)**

DEKLARASI KERJASAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH

Perayaan Puncak Hari Air Dunia di pinggiran Kanal Banjir Barat, 6 Mei 2013, di Semarang, ditandai dengan pembacaan Deklarasi Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Prasetyo Budi Yuwono, ME, selaku Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah bunyi deklarasi tersebut:

“Menyadari sepenuhnya bahwa kerusakan sumber daya air dan lingkungan hidup sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya melalui kerjasama pengelolaan sumber daya air, maka dengan ini kami deklarasikan panca karsa kerjasama pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

1. Kerjasama pengelolaan Kanal Banjir Barat yang terpadu terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan di bawah koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana melalui satuan kerja khusus atau Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Kanal Banjir Barat.
2. Perlu disusun kesepakatan bersama pengelolaan dan perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sinergitas dan peran serta para pihak yang terlibat mutlak diperlukan.
3. Pembentukan dan pemberdayaan komunitas masyarakat peduli sungai di sepanjang sungai guna keberlanjutan fungsi sungai dengan berperan membantu pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
4. Perlu dipetakan interaksi kolaborasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan guna mengembangkan perencanaan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di sekitar sungai.
5. Perlunya pengamanan sarana dan prasaran sumber daya air secara terus menerus, konsisten dan berkelanjutan.

Deklarasi ini akan ditindaklanjuti dengan langkah nyata berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangann yang berlaku.”

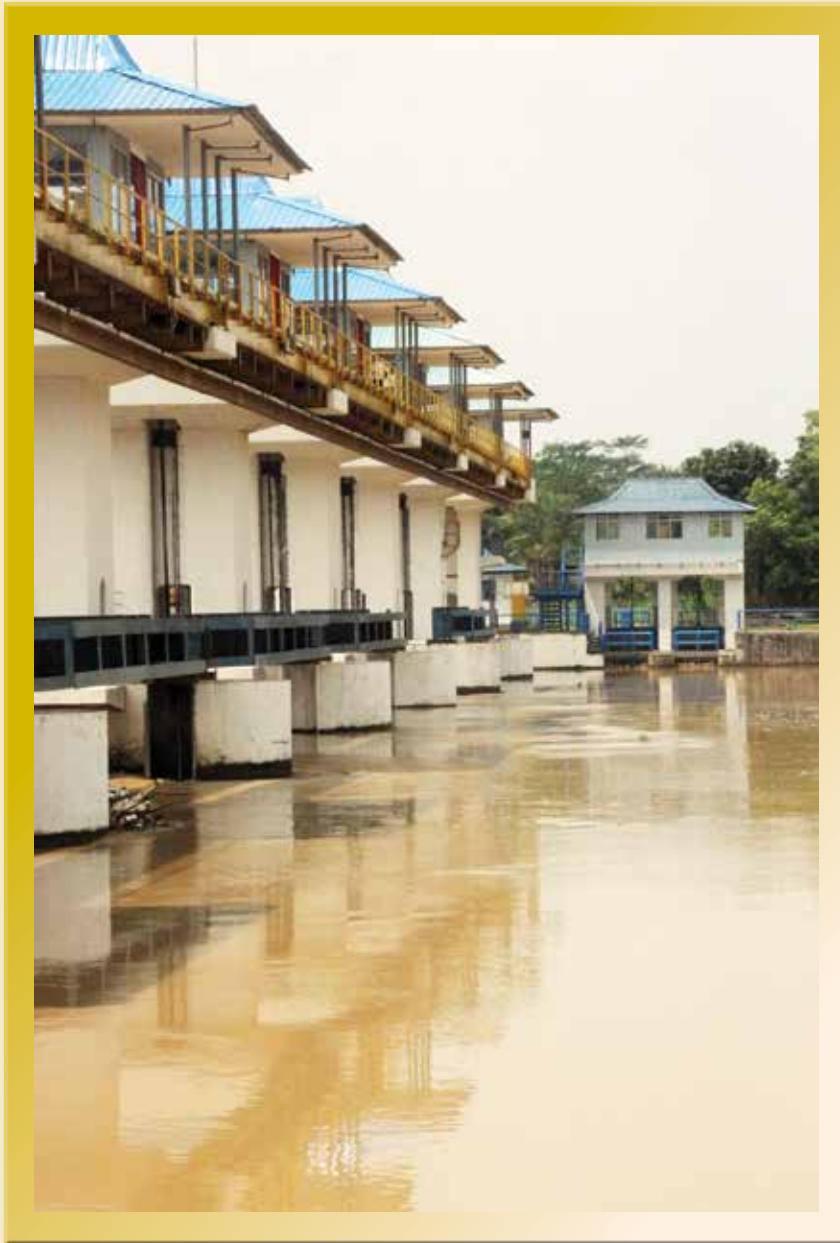
Semarang, 23 April 2013

Kami yang mendeklarasikan,

Wakil Kementerian Pekerjaan Umum Bidang SDA, Pitoyo Subandrio, Ir, Dipl. HE
Wakil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Isprasetyo Basuki, Ir, M.Si
Wakil Pengelola SDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budi Yuwono, ME
Wakil Pengelola SDA Tingkat Kabupaten Kota, Rosyid Hudoyo, Ir, MT
Wakil Perguruan Tinggi Jawa Tengah, Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph. D
Wakil Tokoh Masyarakat, Dr. Nirwan, Ir, Dipl. HE

Deklarasi ini perwujudan komitmen pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan terkait sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Pendeklarasian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan sumber daya air di lapangan. **(tim)**

BENDUNG PAMARAYAN



Bendung Pamarayan terletak di Provinsi Banten, di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian. Secara historis, keberadaan bendung ini memiliki sejarah yang cukup tua, dimulai sejak tahun 1918, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjalanannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bendung Pamarayan pemeliharaannya menjadi terlantar, dalam arti kurang mendapat perhatian dari Pemerintah.

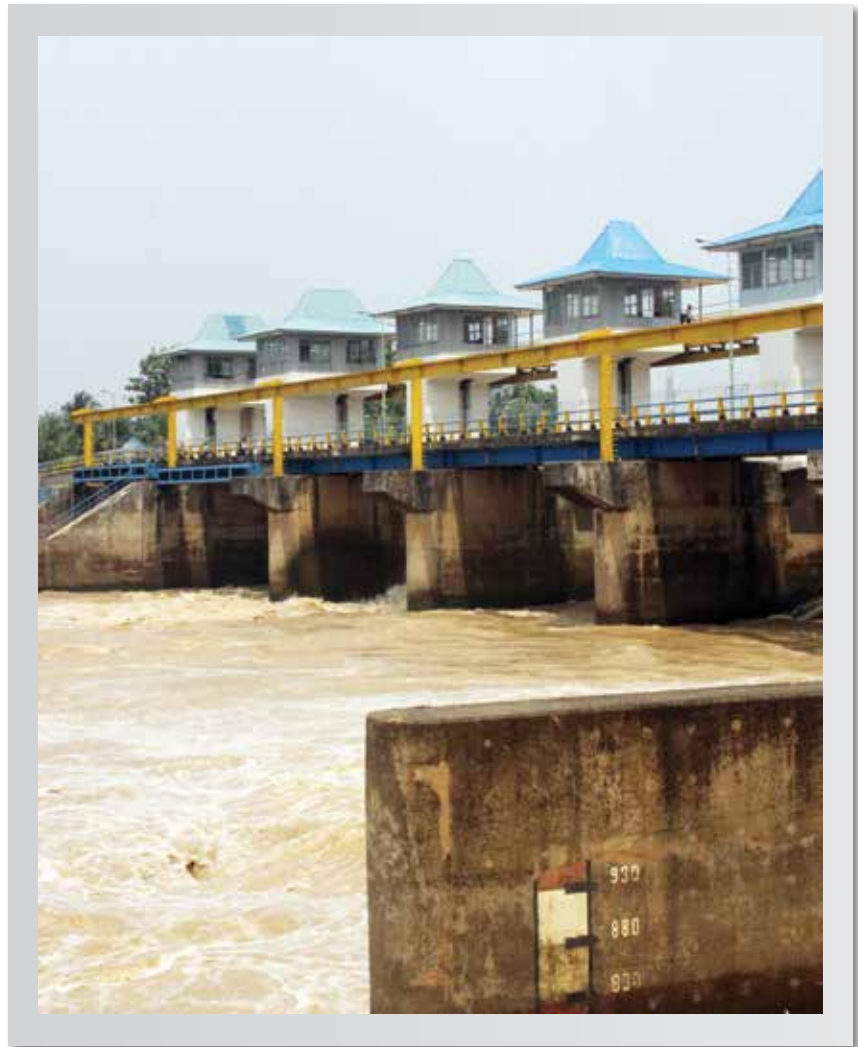
Pada PELITA I, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto saat itu, sekitar tahun 1970, bendung ini direhabilitasi menggunakan dana *International Development Association*. Selanjutnya, di tahun 1985, terjadi penurunan struktur pada Bendung Pamarayan lama, karena terjadinya konsolidasi tubuh bendung dan adanya penggali pasir di bagian hilir bendung (*downstream*) yang dapat mempercepat kerusakan karakteristik sungai Ciujung. Selanjutnya, di tahun 1992, dimulailah pembangunan Bendung Pamarayan baru yang terletak pada sisi kiri bendung lama. Bendung Pamarayan baru ini diselesaikan di tahun 1997 dengan menggunakan dana *Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)* Jepang.

Bendung Pamarayan baru, setelah selesai masa pembangunannya, memiliki tujuan dan manfaat menaikkan tinggi muka air Sungai Ciujung sesuai dengan elevasi daerah yang akan diairi, mengatur pembagian air yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna air, sebagai pengendali banjir, dan dipergunakan sebagai tempat penelitian sumber daya air.

Terkait dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, untuk Bendung Pamarayan baru ini, dilaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan secara berkala. Terdapat beberapa hal terkait yang dilakukan untuk pemeliharaan rutin, yakni berupa pengecekan elektrik, pembersihan sampah di *intake*, pintu sekitar bendung, dan di depan saluran talang saluran induk timur. Ada pula pembersihan rumput di lokasi bendung dan sungai (tebas tebang), serta pengecekan limit switch sebagai pengatur pintu dan kegiatan keamanan operasional bendung.

Untuk pemeliharaan secara berkala, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengurasan lumpur pada kantong lumpur, pengecekan roda-roda pintu, pelumasan pada hois bendung dan pintu *intake*, serta pembersihan panel-panel atau terminal pengatur pintu utama bendung dan pengecekan roda-roda pintu.

Kegiatan pengamatan bendung juga turut dilakukan secara berkala, antara lain dalam bentuk pengamatan kualitas air, sedimen dan karakteristik Sungai Ciujung. Hal lainnya adalah hidrologi dan hidrometri. **(nan/ech)**



SOSIALISASI PENGOLAHAN DATA DAN PUBLIKASI INFORMASI SUMBER DAYA AIR



Visi dan misi tersebut dijalankan secara menyeluruh dan terpadu dengan dukungan peran masyarakat serta data dan sistem informasi sumber daya air melalui sebuah strategi pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengertian informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta atau penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

Untuk informasi publik sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) berwenang melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara dan strategis nasional dengan visi terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dan tiga misi utama, yaitu menjaga kelestarian sumber daya air, meningkatkan pendayagunaan sumber daya air dan mengendalikan daya rusak air.





“Sesuai amanat Undang-undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa pengelolaan sumber daya air perlu didukung oleh adanya Sistem Informasi Sumber Daya Air yang mampu menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air,” ujar Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi Leonarda BA Ibnu Said dalam acara Sosialisasi Pengolahan Data dan Publikasi Informasi Sumber Daya Air, (27/5), Yogyakarta.



Dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi sumber daya air, tentu saja memerlukan dukungan dari berbagai komponen baik dari sumber daya manusia, teknologi maupun manajemennya karena hal-hal tersebut saling terkait satu sama lain. Leonarda mengatakan perkembangan akan kebutuhan terhadap informasi tentang sumber daya air semakin meningkat setiap harinya. Media publikasi informasi pun semakin hari kian beragam, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik berupa *website*,” ujar Leonarda.



Sub-Direktorat Data dan Informasi Direktorat Bina Program Ditjen SDA memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi media publikasi Ditjen SDA yang telah menyediakan sistem berbasis *web* dalam melakukan publikasi data dan informasi untuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang merupakan perpanjangan kewenangan pusat di daerah. Sistem pengelolaan data dan publikasi berbasis *web* ini merupakan pengembangan dari Pengolahan Data Sumber Daya Air (PDSDA) yang biasa dikenal dengan sistem pengelolaan data berbasis PC (*PC based*).

Dalam melaksanakan Sistem pengelolaan data dan publikasi berbasis *web* ini memiliki beberapa permasalahan, di antaranya adalah

keterbatasan sumber daya manusia terutama untuk petugas pengelola Sistem Data dan Informasi di BBWS dan BWS. Diharapkan permasalahan yang ada tersebut dapat ditekan melalui sistem aplikasi berbasis *web* yang sedang dikembangkan.

Leonarda mengingatkan sosialisasi pengolahan data dan publikasi informasi sumber daya air ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta pemahaman penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi dan publikasi informasi sumber daya air yang khususnya bagi jajaran pengambil keputusan di lingkuan BBWS dan BWS. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh BBWS dan BWS. Materi dari kegiatan sosialisasi berupa penjelasan umum penyelenggaraan Sistem Informasi

Sumber Daya Air (SISDA), Kapasitas Pusdata dalam penyelenggaraan SISDA, Peran Komunikasi Publik Ditjen SDA, Sistem Pengelolaan data Ditjen SDA dan Sistem Pengolahan data melalui *web*. Sebelumnya Sosialisasi Pengolahan Data dan Publikasi Informasi Sumber Daya Air ini sebelumnya juga dilaksanakan di Medan pada tanggal 1 dan 2 Mei 2013 di Medan.

KOMPETENSI SDM PERANGKAT PENGADAAN BARANG & JASA



Dengan adanya kompleksitas kegiatan khususnya di bidang irigasi dan rawa harus diimbangi oleh sikap profesionalisme yang tinggi dalam memilih mitra kerja melalui proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, terbuka, transparan dan bersaing dengan adil serta tidak diskriminatif," jelas Prabowo Pratiknyo, Kasubdit. Irigasi Wilayah III, Direktorat Irigasi dan Rawa, mewakili Direktur Irigasi dan Rawa, dalam acara Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2013, 21 Mei 2013, di Yogyakarta.

Prabowo Pratiknyo mengharapkan agar seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mencermati dan memahami isi dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena sebagian besar kegiatan di Kementerian PU yaitu swakelola dan kontraktual, sehingga keahlian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian PU. Maka acara ini bertujuan untuk menyiapkan SDM dalam meningkatkan kompetensi pegawai sebagai perangkat pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu Mudjadi, Kabag. TU BBWS Serayu Opak, mengatakan bahwa pelatihan sertifikasi pengadaan barang/jasa guna mempersiapkan SDM kita dalam menghadapi berbagai macam perubahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Selain itu tahun 2014 di setiap balai dan direktorat yang ada di lingkungan Kementerian PU akan dibentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan).



Dan pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan para pejabat pengadaan yang lebih baik sehingga akan berguna bagi jenjang karier masing-masing. Acara ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari BBWS/BWS di berbagai provinsi dan berlangsung pada tanggal 21 Mei sampai dengan 24 Mei 2013. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan pengadaan barang dan jasa, dan bagi peserta yang lulus dalam ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa akan mendapatkan sertifikat kelulusan pengadaan barang dan jasa. **(tin/ech)**



Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan efek domino di masyarakat. Tak hanya bidang transportasi yang membutuhkan BBM, perubahan harga BBM juga berdampak pada kebutuhan pokok lainnya.

D i pihak lain, mempertahankan harga BBM yang dilakukan oleh beberapa pihak dinilai hanya akan menguras pembiayaan belanja Negara. Pada akhirnya, mempertahankan subsidi untuk BBM serupa dengan mengecek keuangan Negara.

Sementara masyarakat miskin tetap tidak bisa tertolong karena kenyataannya yang menikmati subsidi BBM adalah golongan menengah ke atas. Disimpulkan bahwa, masyarakat miskin sama sekali tidak menikmati subsidi yang selama ini diberikan pemerintah.

Oleh sebab itu, kenaikan BBM bertujuan untuk memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran, memberikan bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah harus lebih sigap memberikan pengertian kepada masyarakat dari dampak kenaikan BBM ini, terutama pada bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Hal itu perlu diketahui masyarakat luas bahwasanya kenaikan BBM adalah untuk mengalihkan manfaat subsidi sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sudah semestinya menyiapkan program-program yang bisa membantu menyejahterakan masyarakat miskin. Semua anggaran Pemerintah dalam hal ini kementerian, dipotong untuk mengamankan fiskal. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkontribusi sebesar Rp 3.803 triliun dari penghematan anggaran yang telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 24.6 triliun.

"Pemerintah memahami, kalau BBM naik maka masyarakat miskin akan mengalami dampak negatif. Kita menaikkan harga BBM, maka ada subsidi BBM yang diamankan. Dana itulah yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan. Ini masalah keadilan," kata Menteri PU Djoko Kirmanto, dalam lansirannya pekan lalu. Ia menegaskan, kementerannya akan membangun infrastruktur dasar yang dapat secara langsung membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. Kementerian PU menyiapkan tiga program senilai Rp 6 triliun melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebagai kompensasi kepada masyarakat terhadap pengurangan subsidi BBM.

PENGALIHAN SUBSIDI BBM UNTUK BANGUN INFRASTRUKTUR



Program tersebut yaitu Sistem Penyediaan Air Minum yang diperuntukkan bagi rakyat miskin di 295 desa/ibukota kecamatan rawan air, 318 kampung nelayan, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 341 kawasan yang sulit air.

Serta, program Infrastruktur Sumber Daya Air yang diarahkan antara lain penyediaan air baku dan pembangunan embung di 93 kabupaten/kota, perbaikan irigasi kecil pada 4.000 desa, serta pembangunan pengaman pantai dan tambatan perahu bagi nelayan miskin dan perbaikan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam.

Program infrastruktur lainnya yaitu, Infrastruktur Permukiman (air minum, sanitasi, tian perahu, jalan dan jembatan, dan jaringan irigasi desa/kelurahan) senilai Rp 2 triliun, melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan upah kerja, material, dan peralatan.

Kementerian PU akan melakukan fokus di 7.300 desa/kelurahan kumuh perkotaan seluruh Indonesia. Desa yang terpilih ialah desa yang tingkat kemiskinannya di atas 50 persen. Total penerima manfaat dari ketiga program tersebut sedikitnya 33 juta jiwa dan total tenaga kerja yang terserap diperkirakan 105 juta orang/hari. ■



PEMERINTAH MEMAHAMI, KALAU BBM NAIK MAKA MASYARAKAT MISKIN AKAN MENGALAMI DAMPAK NEGATIF. KITA MENAIKKAN HARGA BBM, MAKA ADA SUBSIDI BBM YANG DIAMANKAN. DANA ITULAH YANG AKAN DIPAKAI UNTUK MENYELAMATKAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK KENAikan. INI MASALAH KEADILAN

Menteri PU Djoko Kirmanto